

---

# PERKEMBANGAN SEKOLAH ISLAM DI PONTIANAK PADA MASA KOLONIAL (1914-1941)

## *THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC SCHOOL IN PONTIANAK IN THE COLONIAL ERA (1914-1941)*

**Mohammad Rizak Prabowo dan Dyah Kumalasari**

Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Jln. Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia

mohammadrikaz.2020@student.uny.ac.id dan dyah\_kumalasari@uny.ac.id

Diterima tanggal 10 Juli 2021

Disetujui tanggal 6 Juni 2021

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the state of education in Pontianak from 1914 to 1941. Many Islamic schools combined religious lessons with the colonial government's curriculum during this period. This research fills the gap between previous studies that have not thoroughly discussed this educational contestation at the local level. The research used the historical method through the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research shows that in the early 20th century, the colonial government established several schools, such as Europesche Lagere School (ELS) and Hollandsch Inlands School (HIS) in Pontianak. Dualism, discrimination, and gradualism had made these schools unreachable and unequal. The schools did not include religious lessons. It had an alledged impact on distance students from the original culture of the Indies population. This condition encouraged the change of the non-formal education model through a surau into a school to balance Dutch schools and the regulations of the Priesterraden and the Illegal Schools Ordinance. Ulama could no longer freely convey their teachings unless they had permission and recommendations. The first Islamic schools established in Pontianak were the Alqadriah (1914) and the Saigoniah (1925). The change in the form of the school was marked by the adoption of general subjects (Western knowledge) and the Dutch language. The established Islamic schools equated their curriculum with the levels and types of government schools. The Muhammadiyah school (1927) was of the volksschool type and was scouted by 'Hizbul Wathan'. Al-Islamiah College (1926) and Raudhatul Islamiyah College (1936) opened schakelschool, which the graduates equated with HIS.*

**Keywords:** *universities, Islamic schools, curriculum, Pontianak, and Muhammadiyah.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan pendidikan di Pontianak pada periode 1914-1941. Pada periode ini, banyak berdiri sekolah Islam yang memadukan pelajaran agama dengan kurikulum pemerintah kolonial. Penelitian ini penting dilakukan karena studi-studi

sebelumnya belum menguraikan secara detail tentang kontestasi pendidikan di level lokal. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial membentuk sejumlah sekolah, seperti *Europesche Lagere School* (ELS) dan *Hollandsch Inlands School* (HIS) di Pontianak. Dualisme, diskriminasi, dan gradualisme menyebabkan sekolah-sekolah tersebut belum dapat dijangkau banyak orang dan tidak setara. Sekolah-sekolah jenis ini tidak memasukkan pelajaran agama. Hal ini disinyalir berdampak kepada semakin menjauhkan pelajar dari budaya asli penduduk Hindia. Kondisi itu mendorong perubahan model pendidikan nonformal melalui surau menjadi sebuah sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi sekolah-sekolah Belanda serta adanya aturan dari Priesterraden dan Ordonansi Sekolah Liar. Ulama tidak dapat lagi secara bebas menyampaikan pengajarannya kecuali mendapatkan izin dan rekomendasi. Sekolah Islam pertama yang berdiri di Pontianak yakni Perguruan Alqadriah (1914) dan Perguruan Saigoniah (1925). Perubahan bentuk sekolah ditandai dengan adopsi mata pelajaran umum (pengetahuan Barat) dan bahasa Belanda. Sekolah Islam yang didirikan, menyamakan kurikulumnya setara dengan tingkatan dan jenis sekolah pemerintah. Sekolah Muhammadiyah (1927) berjenis *volksschool* dan mendapatkan kepanduan 'Hizbul Wathan'. Perguruan Al-Islamiah (1926) dan Perguruan Raudhatul Islamiah (1936) membuka *schakelschool* yang lulusannya disamakan dengan HIS.

**Kata kunci:** perguruan, sekolah Islam, kurikulum, Pontianak, dan Muhammadiyah.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dipengaruhi sekali oleh Politik Etis. Sekolah tidak lagi hanya dapat dirasakan oleh orang-orang Belanda dan elite bumiputra, masyarakat kelas bawah pun dapat mengaksesnya. Akan tetapi, dunia pendidikan adalah dunia yang penuh dengan kebijakan politis. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada waktu itu juga dipengaruhi sejumlah politik pendidikan kolonialisme. Pendidikan untuk bumiputra tetap diberikan serendah mungkin dan dijaga agar mutunya tidak sama dengan sekolah Belanda (gradualisme dan dualisme). Selain itu, pemerintah kolonial juga menerapkan kurikulum dan standar sekolah yang sama dengan

di negeri Belanda, dengan maksud mempermudah perpindahan murid ke sana (asas *konkordansi*). Hal ini membuat pendidikan terselenggara secara liberal dan menjadi agen kebudayaan Barat yang justru menjauhkan murid-murid bumiputra mengenal bangsanya (Kumalasari 2013:50).

Di sisi lain, sebagian masyarakat bumiputra yang agamis mengkhawatirkan masa depan anaknya yang tidak akan mendapatkan pendidikan agama sama sekali apabila belajar di sekolah pemerintah. Hal itulah yang mendorong sejumlah elite terdidik bumiputra untuk mendirikan sekolah yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Sekolah yang didirikan oleh masyarakat itu sering disebut pula sekolah partikelir atau sekolah swasta. Sekolah swasta ini ada

yang bercorak kebangsaan dan ada pula yang bercorak keagamaan, seperti sekolah Islam (madrasah).

Berbeda dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah Islam hadir dengan menekankan pelajaran agama sebagai program utamanya. Meskipun begitu, pengetahuan umum tetap diajarkan. Embrio sekolah Islam telah hadir sejak abad ke-16 dengan adanya pesantren, surau pengajian, padepokan, atau langgar-langgar, ketika Nusantara dikuasai oleh kesultanan-kesultanan Islam, termasuk di Pontianak (Rahmatullah 2014:4).

Keberadaan ulama memainkan peranan kuat di masa itu. Mereka bukan hanya sebagai sumber ilmu, namun juga sebagai orang tua kedua yang sangat dihormati. Selama ratusan tahun, pendidikan pesantren inilah yang bertahan dan satu-satunya yang tersedia bagi bumiputra, serta berlangsung secara tradisional sebelum abad ke-20.

Setidaknya ada empat alasan mengapa pendidikan Islam pada abad ke-20 dikemas dengan bentuk yang lebih modern dalam sebuah madrasah atau sekolah. *Pertama*, pembaruan pendidikan Islam dipengaruhi adanya semangat Pan-Islamisme dan gerakan purifikasi Islam yang sedang berkembang kala itu. Pelajar bumiputra yang memperdalam ilmu agama Islam di kota-kota di jazirah Arab, seperti Kairo dan Makkah, merasakan gagasan Pan-Islamisme yang dibawakan oleh Jamalludin Al-Afgani begitu membius pikiran mereka. Para pelajar menyaksikan sendiri pendidikan di negara itu berkembang baik dan berkontribusi terhadap kemajuan negerinya. Hal itulah yang kemudian menginspirasi

para pelajar, seperti K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asyari, dan H.M Basiuni Imran (Sambas), untuk memajukan daerahnya melalui pembaruan pendidikan. Hal ini merupakan salah satu program dari gerakan purifikasi Islam yang menyerukan agar masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga mengakomodasi ilmu pengetahuan umum (Nasrullah et al. 2018:135-137).

*Kedua*, sekolah Islam didirikan untuk mengimbangi keberadaan sekolah pemerintah yang bersifat dualisme dan terlalu mementingkan intelektualitas. Motif agama juga menjadi alasan berdirinya sekolah Islam ini. Ketika itu, keberadaan sekolah milik misionaris Katolik mulai marak. Di Kalimantan Barat, misalnya, pendirian sekolah Katolik mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial dan masyarakat Tionghoa (Safitri, Mujahidin, dan Yusnita 2020:86). Orang-orang Tionghoa justru lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik daripada sekolah pemerintah yang khusus untuk kalangan mereka, seperti Hollandsch Chinese School (HCS). Selain itu, adanya hubungan organis antara gereja, sekolah Katolik, dan rumah sakit atau klinik menjadikan misi Katolik secara kelembagaan sangat kuat.

*Ketiga*, perlunya menghadirkan pendidikan Islam yang lebih modern, baik dari bentuk lembaga maupun kurikulumnya. Erwin Mahrus (dalam Ramadhan, Hariansyah, dan Wahab 2019:8) menyebutkan para pendiri sekolah Islam berpandangan bahwa sebagai akibat perkembangan zaman,

pendidikan agama tidak lagi dapat dikelola secara tradisional, sehingga perlu dikelola dalam bentuk yang lebih modern. Hal ini dapat dimengerti bahwa para pendiri sekolah Islam ataupun ulama-ulama waktu itu sebagian besar telah menunaikan haji, dan kebiasaan seorang yang berhaji kala itu juga bermukim selama beberapa saat di jazirah Arab untuk memperdalam ilmu. Golongan ini terpengaruh oleh ide-ide Pan-Islamisme dan pembaruan pendidikan Islam. Gagasan tersebut kemudian dicoba diterapkan sepulangnya mereka dari berhaji. Kurikulum yang digunakan juga disempurnakan sehingga lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan lulusan sekolah umum (Safitri et al. 2020:77).

*Keempat*, adanya aturan dan tekanan dari pemerintah kolonial terkait pengajaran. Aturan Priesterraden yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam kala itu, membuat para ulama tidak lagi bebas memberikan pengajaran Islam (Kumalasari 2013:27). Mereka harus mengajukan izin kepada pemerintah kolonial, bahkan aturan itu di kemudian hari semakin diperketat. Hanya ulama-ulama yang mendapatkan rekomendasi saja yang dapat mengajar (Agung dan Suparman 2012:18). Aturan Ordonansi Sekolah Liar pada 1932 juga mewajibkan pendirian sekolah swasta atau partikelir mendapatkan izin pemerintah kolonial, dengan guru-guru yang mendapatkan izin mengajar (Makmur et al. 1993:87). Pendirian sekolah Islam banyak terjadi di wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim, seperti di Pontianak.

Untuk itu, gambaran pendidikan di Pontianak pada awal abad ke-20 penting dibahas terlebih dahulu dalam tulisan ini. Pembahasan dilanjutkan dengan sekolah-sekolah Islam yang didirikan setelahnya, berikut dengan kurikulum yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjalanan sejarah pendidikan Islam di Pontianak dari pertama kali sekolah Islam didirikan, yakni Perguruan Alqadriah pada 1914, hingga 1941 sebelum Jepang berkuasa dan mengganti sistem sekolah pada 1942. Dengan begitu, dapat diketahui bagaimana kehadiran sekolah-sekolah Islam ini dapat memunculkan kesadaran intelektual, tumbuhnya gerakan nasionalisme, dan tatanan sosial baru di tengah masyarakat Pontianak pada masa kolonial. Kurikulum yang khas di sekolah-sekolah Islam tersebut juga akan menjadi hal yang dibahas. Kontestasi pendidikan inilah yang belum banyak dibahas secara detail di dalam studi-studi sebelumnya.

Meskipun begitu, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang secara tidak langsung mengangkat tema tentang sekolah Islam di Pontianak. *Pertama*, penelitian oleh Rahmatullah yang berjudul *Surau sebagai Pusat Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Pontianak* (2014). Penelitian ini membahas tentang model pendidikan Islam di Pontianak yang awalnya terlaksana secara nonformal melalui keberadaan surau-surau yang tersebar di kampung. Surau-surau ini nantinya bermetamorfosis menjadi sebuah madrasah atau sekolah Islam. Penelitian ini sangat berguna dan relevan digunakan oleh penulis untuk

mengungkapkan awal kemunculan madrasah atau sekolah-sekolah Islam di Pontianak.

*Kedua*, penelitian oleh Ramadhan, Hariansyah, dan Wahab yang berjudul *Perguruan Islamiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tertua di Pontianak* (2019). Penelitian ini membahas Perguruan Al-Islamiyah di Kampung Bangka, yang awalnya hanya sebuah pengajian di sebuah surau. Pada perkembangannya, pengajian ini semakin besar dan membentuk madrasah pada 1926. Sekolah ini berhasil melewati berbagai dinamika zaman dan tetap bertahan hingga sekarang. Temuan ini menjadi informasi yang sangat berguna. Perguruan Islamiyah akan menjadi salah satu sekolah yang turut dibahas dalam penelitian ini.

Hal yang membedakan dari dua penelitian di atas ialah dalam tulisan ini tidak hanya memaparkan sejarah perjalanan transformasi pendidikan Islam dari corak tradisional ke modern. Akan tetapi, tulisan ini juga memaparkan bagaimana sekolah-sekolah Islam di Pontianak hadir sebagai respons dari politik pendidikan kolonial dan berusaha menyaingi pesatnya perkembangan sekolah yang diusahakan misi Katolik. Selain itu, fokus pada penelitian ini juga tidak hanya satu sekolah, namun semua sekolah Islam yang ada di Pontianak dalam periode 1914-1941 secara umum, serta perkembangan kurikulumnya yang juga tidak kalah penting untuk dipaparkan.

Tulisan ini menggunakan kerangka penelitian sejarah lokal. Sejarah lokal dipandang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan di tempat tertentu di masa lalu yang berevolusi

dalam berbagai pengaturan, baik di perkotaan maupun perdesaan atau kampung. Sugeng Priyadi (dalam Miftahuddin 2020:5) menyebutkan bahwa studi sejarah lokal memiliki empat corak. Salah satunya studi yang mengangkat perkembangan aspek tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Aspek yang dapat dikaji itu misalnya terkait dengan pendidikan, ide-ide, mentalitas, intelektualitas, hingga perdagangan.

Sejarah lokal sudah selayaknya dipelajari dan diteliti agar dapat menjadi sebuah koreksi terhadap generalisasi-generalisasi pada penulisan sejarah nasional. Sejarah lokal akan memenuhi kebutuhan untuk menghadirkan masa lampau yang manusiawi atau sejarah sehari-hari (Miftahuddin 2020:9).

## **B. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang dilalui dalam beberapa tahap, yakni: pengumpulan sumber-sumber (heuristik), melakukan kritik sumber (verifikasi), penafsiran atas sumber-sumber (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi).

Dilihat dari periodisasinya, yakni sekitar masa pergerakan kebangsaan 1900-1942, beberapa sumber primer terkait yang berhasil penulis temukan ialah surat kabar lokal yang pernah terbit di Pontianak pada periode kolonial, yakni *Berani* (1925), *Sinar Borneo* (1926), *Kapuas Bode* (1927), *Matahari Borneo* (1936), dan *Borneo Barat Nieuws en Advertentieblad* (1938). Penulis juga berhasil menemukan satu iklan penerimaan siswa di

sekolah Raudhatul Islamiyah pada 1940 yang dimuat majalah *Kesadaran*. Iklan tersebut memuat informasi penting tentang sekolah tersebut. Adapun sumber sekunder lain yang digunakan berupa buku-buku dan hasil kajian yang terkait pendidikan di Kalimantan Barat dan sejarah kota Pontianak.

Sumber primer ditempatkan pada urutan pertama dalam penelitian sejarah, meskipun dibutuhkan pula sumber-sumber lain seperti buku, hasil penelitian, ataupun ensiklopedia untuk mengatasi kekurangan pada data yang didapat. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber, baik secara eksternal untuk memeriksa keaslian sumber, maupun pemeriksaan internal untuk mengetahui kredibilitas (isi) sumber. Fakta-fakta yang didapatkan dalam dua proses ini dimaknai dan ditempatkan secara kronologis dan tematis. Proses pemaknaan memerlukan pengetahuan yang mencukupi tentang tema penelitian yang sedang dikerjakan sehingga diperlukan proses interpretasi. Penjabaran fakta-fakta sejarah secara kronologis tanpa adanya suatu interpretasi akan menjadi sebuah karya kronik, bukan karya sejarah (Kanumuyoso 2020:44). Hal ini dilakukan agar dihasilkan penyusunan fakta-fakta yang komprehensif dalam proses historiografi.

Kanumuyoso (2020:45-46) menyebutkan bahwa penggunaan metodologi akan menyebabkan adanya pendekatan antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal ini karena setiap penggambaran terhadap gejala sejarah yang kompleks menuntut adanya pendekatan yang memungkinkan seleksi fakta yang diperlukan.

Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial. Pendekatan ini mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka ragam. Sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Dengan penggunaan ilmu-ilmu sosial, sejarawan mempunyai kemampuan menerangkan lebih jelas, sekalipun terkadang harus terikat pada modal teoretis (Kuntowijoyo 2003:39-41). Dengan begitu, kajian sejarah pendidikan merupakan pendekatan sejarah sosial karena menjelaskan masalah-masalah sosial di masyarakat. Terlebih pada penelitian ini, lahirnya sekolah Islam akan memunculkan elite-elite sosial baru dalam tatanan masyarakat.

### **C. HASIL DAN BAHASAN**

#### **1. Gambaran Pendidikan di Pontianak Awal Abad Ke-20**

Bergaungnya Politik Etis, terutama di program pendidikan pada 1900-an, terlambat dirasakan oleh rakyat bumiputra di Kalimantan, khususnya di Pontianak yang secara administratif masuk dalam *Borneo Westerafdeeling* (Keresidenan Borneo Barat). Keberadaan sekolah formal masih sangat sedikit. Mutu dan fasilitas sekolah terbaik hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti sekolah *Europesche Lagere School (ELS)* bagi anak keturunan Eropa. Pemerintah kolonial baru mendirikan Sekolah Kelas Satu (*Eerste Inlandsche School*) di Pontianak pada 1892 dengan lama pendidikan selama enam tahun, yang menampung murid-murid asal keluarga bangsawan bumiputra. Barulah kemudian, pada 1893, dibuka *Tweede Inlandsche School* atau Sekolah

Kelas Dua yang diperuntukkan bagi rakyat kelas bawah dengan lama pendidikan tiga tahun (Alqadrie dan Sastrowardoyo, 1984: 39). Pada 1912, Sekolah Kelas Satu mendapatkan mata pelajaran bahasa Belanda dengan menambahkan masa studi menjadi tujuh tahun. Dengan demikian, sekolah ini berganti menjadi HIS (Hollandsch Inlandsche School) untuk anak-anak tokoh bumiputra dan anak-anak pegawai negeri yang bergaji sekurangnya f75 per bulan atau termasuk keluarga bangsawan yang mempunyai gelar seperti raden (Sugiono et al. 2020:22). Sekolah Kelas Dua kemudian lebih dikenal dengan nama Standard School (Nasution 2001:60,75).

Oleh karena jumlah sekolah pemerintah yang dirasa masih kurang dan belum menyeluruh bagi semua lapisan, sekolah-sekolah swasta atau partikelir kemudian banyak didirikan. Berdirinya sekolah-sekolah partikelir ini dilatarbelakangi banyak pertimbangan. Sebagai contoh, Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, merasa gelisah akan pendidikan di Hindia Belanda yang diskriminatif (Akbar 2013). Diskriminasi tersebut tidak hanya dalam peruntukannya saja, namun juga pada kurikulumnya. Sekolah untuk kalangan bawah ditujukan sekadar agar murid-muridnya dapat membaca dan menulis. Para elite bumiputra terdidik merasa bahwa sistem sekolah yang didirikan pemerintah kolonial terlalu berorientasi Barat dan menjadi agen kebudayaan mereka. Anak-anak bumiputra yang bersekolah di sekolah pemerintah dikhawatirkan akan semakin jauh dari

budaya aslinya (Nasution 2001:145). Salim mengungkapkan bahwa pemerintah kolonial memang berusaha untuk menata masyarakat penduduk bumiputra untuk masuk dalam sistem pendidikan Barat (Sugiono et al. 2020:24). Oleh sebab itu, materi-materi yang berkaitan dengan kebangsaan tidak diberikan.

Secara umum, sekolah-sekolah swasta yang didirikan pada masa itu, dilihat dari kepemilikan atau pengelolaannya dibagi ke dalam tiga jenis. *Pertama*, sekolah yang dikelola oleh organisasi pergerakan dan partai politik, seperti Taman Siswa, Parindra, dan Sarekat Rakyat. *Kedua*, sekolah yang dikelola oleh badan-badan keagamaan yang dimiliki oleh gereja Katolik dan organisasi Islam, seperti Muhammadiyah. *Ketiga*, sekolah yang didirikan dan dikelola secara pribadi dan sporadis. Sekolah swasta pertama di Pontianak pada masa itu sulit untuk dilacak karena keterbatasan sumber. Akan tetapi, di dalam buku *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat* disebutkan bahwa pada 1910 misi Katolik di Pontianak telah mendirikan sebuah *volkschool* atau sekolah rakyat (Soedarto, Adhisidharto, dan Sugeng 1978:19). Beberapa tahun kemudian, sekolah partikelir mulai marak berdiri. Sebagai contoh, sekolah yang dikelola secara pribadi oleh Kesultanan Pontianak. Sekolah itu berdiri pada 1914 dengan nama Perguruan Alqadriah (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:42).

Di Pontianak, organisasi seperti Muhammadiyah diketahui baru membuka sekolahnya pada 1927. Pada pemberitaan di *Kapuas Bode* edisi 24

September 1927, diberitakan bahwa telah dibuka Moehammadijah School yang memberikan pengajaran tentang agama Islam. Sekolah ini dipimpin oleh guru Sekolah Kelas Dua bernama M. Joenoes. Tempat belajarnya menumpang di sekolah milik pemerintah sehingga pengajaran baru dapat diberikan pada siang hingga sore hari (Rozet 1927:2). Pada 1930-an, mulai berdiri sekolah-sekolah swasta bercorak kebangsaan yang dikelola Taman Siswa, Parindra, dan organisasi Persatuan Anak Borneo (PAB). Bersamaan dengan itu mulai muncul pula gerakan-gerakan kependuan, seperti Hizbul Wathan (Muhammadiyah) dan Surya Wirawan (Parindra), yang juga memberikan pendidikan kebangsaan bagi usia muda (Soedarto et al. 1978:30-31).

Akan tetapi, belum ada sekolah lanjutan di Kalimantan Barat setingkat MULO hingga 1940 yang didirikan oleh pemerintah. Sebenarnya pada 1937 telah didirikan sekolah MULO di Pontianak, tetapi sekolah ini dimiliki dan dikelola oleh misi Katolik sehingga peruntukannya lebih difokuskan untuk kalangan tertentu. Sekolah-sekolah kejuruan yang rata-rata dapat menerima lulusan *volksschool*, seperti Ambact-school (Sekolah Pertukangan, 1913) dan Klein Handel School (Sekolah Dagang Kecil, 1937), masih kurang diminati karena tidak memiliki jenjang lanjutan yang jelas dan dianggap bukan sekolah elite (Ahok et al. 1980:50-52).

Atas dasar kekurangan tenaga guru, sekitar tahun 1920-an, pemerintah sebenarnya juga membuka *normaal-cursus* bagi lulusan *volksschool* yang dapat ditempuh hanya dua tahun. Lulusannya akan mendapatkan ijazah

guru bantu dan ditempatkan pada *volksschool* yang ada. Akan tetapi, penempatan dan status yang disandang bagi lulusannya ternyata cukup mengecewakan. Mereka ditempatkan di *volksschool* yang sangat terpencil dengan gaji yang amat minim, ditambah lagi tidak adanya kejelasan kapan mereka dapat diangkat menjadi guru penuh serta dapat berpindah tugas ke sekolah lain (Mandey 1929a:2).

Hal ini menyebabkan lulusan sekolah dasar dari Pontianak harus pergi ke Jawa untuk melanjutkan ke jenjang sekolah menengah yang mutu lulusan dan masa depannya dianggap lebih baik. Situasi ini menyulitkan para lulusan. Tidak sedikit yang memilih untuk tidak melanjutkan studi karena keterbatasan biaya. Mereka yang beruntung mengenyam pendidikan hingga ke Jawa, nantinya menjadi kalangan elite yang terpengaruh ide-ide nasionalisme dan kemerdekaan. Sebagai contoh, Gusti Sulung Lelanang pada 1923 mendirikan Sarekat Rakyat (SR) Pontianak yang kerap melakukan propaganda dan agitasi terhadap pemerintah kolonial melalui media massa. Setamatnya dari HIS Pontianak, ia melanjutkan studinya di Normal-school Mester Cornelis (Jatinegara) dan lulus pada 1920 (Listiana 2019:110).

## **2. Berdirinya Sekolah-Sekolah Islam di Pontianak**

Tidak selamanya pelaksanaan pendidikan di Pontianak pada masa itu terselenggara dalam sebuah lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial maupun swasta. Proses pendidikan ada kalanya berlangsung secara



nonformal di luar gedung sekolah. Model pendidikan ini justru telah berlangsung lebih dahulu. Keberadaan surau dan ulama memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan santri. Surau memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyebaran ilmu-ilmu agama Islam jauh sebelum pendidikan berbasis madrasah mulai hadir (Rahmatullah 2014:2).

Ulama-ulama ini awalnya membatasi pengajaran agama Islam di lingkungan istana. Perlahan mereka mulai mengajarkan agama Islam di lingkungan permukiman penduduk bumiputra, dengan surau sebagai pusat pengajarannya (Nurchayani, Sulistyorini, dan Hasanudin, 1999:87). Setiap surau memiliki setidaknya seorang alim ulama yang mendapatkan gelar Tuan Guru. Surau di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, fungsinya hanya semata-mata sebagai tempat belajar dan mengajar ilmu agama Islam.

Oleh karena itu, surau terdapat hampir di setiap kampung. Sementara itu, untuk keperluan ibadah, perayaan, dan sebagainya, dilakukan di surau besar atau masjid (Rahmatullah 2014:4). Fungsi surau di Pontianak agaknya mirip dengan fungsi langgar yang banyak dijumpai di Jawa pada masa itu. Langgar sebenarnya merupakan tempat pengajaran permulaan. Mereka yang ingin memperdalam pelajaran dapat melanjutkannya ke pesantren atau lembaga pendidikan Islam lain yang lebih besar (Agung dan Suparman 2012:15).

Tuan Guru yang mengajar di surau-sarau tidak dapat dikatakan sekadar ulama yang memperoleh pendidikan

agama Islam secara turun temurun. Lebih dari itu, mereka sebenarnya telah menempuh pendidikan dengan bermukim di jazirah Arab, terutama Makkah dan Madinah, paling sedikit lima tahun. Tuan Guru ini menguasai berbagai kitab, ilmu syariah, *siyasa*, *jinayah*, *nahu*, saraf, hingga tarekat. Tidak sedikit pula Tuan Guru yang memiliki karya tulis. Ketika sekolah-sekolah formal mulai berdiri, pendidikan surau tetap dipertahankan sebagai pendidikan komplementer yang diselenggarakan siang hingga sore hari. Salah seorang Tuan Guru yang lahir dari pendidikan surau dan dikenal sebagai tokoh ulama ialah H. Abdul Rani Mahmud. Ia dikenal menguasai pengetahuan umum yang diperolehnya dari madrasah. Ia juga mempelajari seni budaya Islam dan mendalami tarekat (Rahmatullah 2014:8).

Perkembangan pendidikan di surau tersebut bersifat menetap dan akhirnya bertransformasi menjadi suatu organisasi pendidikan. Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mengimbangi materi pelajaran yang diterima oleh murid-murid di sekolah Belanda, yang dipandang membahayakan dan dapat merusak kepribadian bangsa (Alqadrie dan Sastrowardoyo, 1984:41). Selain itu, ada pula pandangan dari para ulama bahwa seiring perkembangan zaman, pendidikan agama tidak lagi dapat dikelola secara tradisional (Ramadhan et al. 2019:88).

Aturan Priesterraden yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam juga turut mendorong perubahan pendidikan nonformal di surau-sarau. Pada 1905, keluar aturan bahwa orang yang akan

memberikan pengajaran atau pengajian Islam harus meminta izin pada pemerintah kolonial. Aturan itu semakin diperketat pada 1925. Tidak semua ulama atau kiai dapat memberikan pelajaran kecuali telah mendapat rekomendasi dan persetujuan pemerintah (Kumalasari 2013:27).

Untuk itu, pada 1914, melalui pengelolaan langsung oleh Kesultanan Pontianak berdiri Perguruan Alqadriah yang lokasinya masih di sekitar Keraton Kadriyah. Perguruan ini dikhususkan untuk keluarga dan kerabat Kesultanan Pontianak sehingga masyarakat di luar golongan tersebut sulit mengaksesnya. Pandangan diferensiasi sosial masih berkembang ketika itu. Kalangan bangsawan tetap menjaga kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan dari rakyat biasa. Untuk itu, sekolah ini merekrut guru-guru yang didatangkan dari Aceh, Palembang, dan Sumatra Barat, terutama yang masih keturunan Arab. Kurikulum pelajaran dititikberatkan pada agama Islam, bahasa Arab, dan Al-Qur'an (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:43).

Di sebelah timur keraton, berdiri pula sebuah surau yang memberikan pengajaran agama Islam kepada masyarakat. Pendirinya adalah Muhammad Yusuf Saigon, berasal dari Banjar (Kalimantan Selatan) dan masih keturunan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ia dikenal sebagai hartawan yang memiliki usaha perkebunan karet yang luas dan dikenal pula sebagai dermawan (Rasjid 1926:3). Dengan dibantu saudaranya, Muhammad Arsyad, mereka bertekad untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul

melalui surau. Pada 1925, setelah kedatangan alim dari Ketapang bernama Abdus Shamad (lulusan Madrasah Shaulatiah Makkah), didirikanlah Perguruan Saigoniah dengan pondok-pondok tempat tinggal para pelajar dan ruang kelas lengkap (Zurrendra 2019).

Perguruan Islam terus bermunculan. Pada 1926 didirikan Perguruan Al-Islamiah di Kampung Bangka (bagian selatan Pontianak) atas prakarsa dari Haji Arief bin Haji Ismail. Awalnya, Al-Islamiah adalah perkumpulan pengajian untuk orang-orang tua yang dilaksanakan di kediamannya. Pengajian itu menunjukkan perkembangan yang positif. Haji Arief yang dikenal dermawan mendirikan bangunan khusus untuk para jemaah lengkap dengan ruang belajar (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:44). Pada 1928, perguruan ini telah memiliki 140 murid dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan secara terarah dan terpadu layaknya sebuah sekolah. Haji Arief menyumbangkan uangnya untuk membangun sebuah gedung pendidikan Islam dengan luas 25 meter dan lebar 8,5 meter. Pada 1932, perguruan ini semakin memantapkan pengorganisasiannya dengan menetapkan dua guru agama, yakni Haji Abdul Manaf dan Haji Muhammad Akief, sebagai dua orang pengajarnya (Ajisman 2016:347).

Kedua orang tersebut berasal dari Sumatra Barat (Pariaman) dan juga merupakan kader Muhammadiyah (Zahro, Noor, dan Firmansyah 2019:6). Oleh sebab itu, mereka juga merintis pendirian Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Pontianak sebagai cabang pertamanya di tahun 1926. Ketua pertamanya bernama Arsyad

Annasar, seorang hartawan pemilik percetakan Annasar. Lewat jaringan antarguru agama di Pontianak, Muhammadiyah berhasil membuka sekolah pertamanya, yang lebih merupakan sebuah kursus agama. Kala itu, sekolah tersebut dipimpin oleh M. Joenoes. Pendidikan dilaksanakan siang hingga sore hari dengan menumpang tempat di Sekolah Gubernemen Kelas II (Rozet 1927:2).

M. Joenoes sendiri dikenal sebagai salah satu guru sekolah yang cukup berpengaruh di Kalimantan Barat. Pada 1 Januari 1929, ia merupakan salah satu pendiri Perserikatan Guru Borneo Barat (PGBB) dan dipercaya duduk sebagai komisaris. PGBB merupakan cabang dari Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berpusat di Jawa (Mandey 1929:1). Barulah beberapa tahun kemudian, melalui kerja bersama pengurus yang ingin menyebarkan cita-cita luhur Muhammadiyah untuk mengembangkan pendidikan, sebuah *volkschool* di Gang Mariana, Pontianak berhasil dibuka (Soedarto et al. 1978:64).

Muhammadiyah cabang Pontianak diketahui masih memiliki amal usaha lain yang dikelola oleh sayap organisasi wanitanya, yakni Aisyah. Organisasi ini dipimpin oleh R.A Sujarah, istri Dokter Agoesdjam yang merupakan sedikit dari dokter bumiputra di Pontianak dan bertempat tinggal di kawasan elite Heerenstraat (Gouvernements Bedrijf der Telefonie 1929:13). Setiap tahun Aisyah mengadakan pasar amal yang keuntungannya digunakan untuk membiayai taman kanak-kanak (TK), sekolah pengajian, dan keperluan lainnya. Kegiatan Aisyah cabang

Pontianak ini juga dibantu oleh anak R. A Sujarah, yakni Djohar Insiyah. Ia lulusan Van Deventer School Semarang yang dikenal sebagai sekolah menengah untuk kalangan atas yang dipersiapkan menjadi guru Sekolah Kepandaian Putri (SKP) atau guru TK (Sutjiatiningsih 1983:8). Djohar Insiyah inilah yang di kemudian hari mendirikan Yayasan Pemeliharaan Anak-anak Cacat (YPAC) bersama suaminya, Dokter Suharso, yang merupakan pahlawan nasional RI.

Semangat untuk terus mendirikan sekolah Islam di kalangan hartawan muslim dengan dukungan ulama terus bergulir. Pada 1936, pedagang-pedagang keturunan Arab mendirikan Perguruan Raudhatul Islamiyah di Kampung Mariana, dengan pengurus pertamanya, yakni H. Ambo Pasir, H. Badarudin Fatah, H. Usman, H. Ismail Usman, dan H. Dja'far (Wahidin 2016). H. Ambo Pasir pada 1930 tercatat menjadi anggota Landraad di Pontianak yang juga dikenal sebagai saudagar kaya melalui bisnis perkebunan, rumah sewa, dan percetakan (Mandey 1930:6). Sekolah ini cukup digemari. Letaknya strategis di tengah kota dan dianggap setara dengan HIS. Sekolah ini juga mengajarkan bahasa Belanda dan pengetahuan umum (Listiana 2019:100).

### **3. Kurikulum Sekolah-Sekolah Islam di Pontianak 1914-1941**

Maraknya pendirian sekolah Islam di Pontianak pada masa itu merupakan jawaban dari penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial. Pendidikan dirasa belum menyentuh aspek kebudayaan dan norma-norma

yang berlaku di masyarakat muslim. Asas *konkordansi* mengantarkan sekolah bercorak liberal yang tidak memasukkan pelajaran agama. Pengajarannya yang mengedepankan intelektualitas dipandang tidak berisi semangat kebangsaan dan tidak berisi usaha-usaha untuk mengembangkan kebudayaan lokal. Sementara itu, aturan Priesterraden juga menjadi sebuah rintangan dalam perkembangan pendidikan Islam (Agung dan Suparman 2012:25).

Para ulama dan cendekiawan Islam saat itu perlu mencari cara baru dalam menyampaikan pengajarannya. Hal ini disebabkan aturan Priesterraden yang membuat pengajaran agama Islam secara tradisional tidak dapat dilaksanakan secara leluasa. Oleh sebab itu, didirikanlah sekolah atau madrasah. Selain lebih teroganisir dengan baik, kegiatannya terpusat di gedung sekolah sehingga lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Perkembangan yang ada telah menyadarkan orang tua murid bahwa anak-anak mereka perlu mendapatkan pula pengetahuan Barat. Pengetahuan ini dianggap bisa membuka pintu untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Orang-orang yang memperoleh pengetahuan Barat juga dapat meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat (Nasution 2001:66).

Dalam perjalanannya, sekolah-sekolah Islam yang telah disebutkan di atas mengalami fluktuasi. Surat kabar *Sinar Borneo* edisi 10 Mei 1926 mengabarkan tentang sebuah sekolah Arab, yang saat itu dikepalai Syarif Yusuf, dengan jumlah peserta didik kurang lebih 200 siswa. Masyarakat memandang sekolah ini sebagai

sekolah khusus keturunan Arab atau untuk kalangan tertentu, padahal sekolah ini juga menerima siswa dari kalangan Melayu. Penulis menduga sekolah yang dimaksud ialah Perguruan Alqadriah, sebab salah satu putra Syarif Muhammad Al-Qadri (Sultan Pontianak) juga belajar di sekolah tersebut (Rasjid, 1926a:3). Penyebutan sekolah yang dimiliki oleh kesultanan dengan sekolah Arab juga terjadi di Sambas. Madrasah Al-Sulthaniyah juga disebut serupa oleh masyarakat karena mengedepankan kurikulum pendidikan agama Islam dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar (Nasrullah et al. 2018:137).

Pada fase 1930-an, kemunculan sekolah Islam lainnya menjadikan masyarakat memiliki pilihan alternatif untuk menyekolahkan anaknya. Pertimbangan jarak tempuh juga dipikirkan oleh orang tua. Letak Perguruan Alqadriah yang berada di kawasan kesultanan membuat sekolah ini sulit untuk diakses. Terlebih citra sekolah ini yang hanya menerima anak-anak dari keluarga kerajaan sulit dihilangkan. Selain itu, kurikulum Perguruan Alqadriah hanya menekankan pada pelajaran seputar agama Islam dan bahasa Arab. Sekolah ini tidak mengajarkan bahasa Belanda dan pengetahuan umum karena dianggap ilmu sekuler dan kafir. Perguruan Alqadriah bertahan hingga 1941 (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:42-43).

Perguruan Al-Islamiyah (Kampung Bangka) dalam proses pendidikannya menggunakan kurikulum yang tidak hanya memfokuskan pelajarannya pada

agama Islam, namun juga menerapkan kurikulum Belanda dengan menghadirkan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah pemerintah. Selain menyelenggarakan madrasah setingkat *volksschool* (sekolah desa), kemajuan pesat Al-Islamiah tercapai ketika sekolah itu dipercaya membuka *vervolgschool* dan *schakelschool* (Ramadhan et al. 2019:87). Hal lain yang membuat perguruan ini berkembang pesat ialah kebijakan penerimaan murid perempuan mulai tahun ajaran 1933. Kebijakan ini diinisiasi oleh Hj. Salamah yang merupakan istri H. Arief bin H. Ismail. Ini menjadi suatu terobosan yang cukup berani kala itu, di tengah masyarakat yang belum seluruhnya berpikiran untuk menyekolahkan anak perempuannya (Ramadhan et al, 2019:8).

Pentingnya kaum perempuan untuk menempuh pendidikan sudah menjadi isu penting yang diangkat beberapa pers lokal sejak 1920-an. Surat kabar *Berani* yang berhaluan kiri menyindir secara satir orang tua yang ketika itu masih memberikan nasihat-nasihat kolot untuk tidak mencari seorang istri yang berpendidikan karena dianggap akan gemar melawan suami. (Boullie 1925b:2). Majalah *Tjaja Timur* No. 6 tahun 1928, pada rubrik “Sinar Iboe” menyuarakan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan (Listiana, 2017:86).

Sekolah sambungan atau *vervolgschool* adalah sekolah yang dibentuk untuk menambah atau memperluas pelajaran yang dirasakan amat sedikit diperoleh dari *volksschool*. Pelajaran yang diberikan antara lain Ilmu Bumi, Ilmu Alam, dan Pendidikan

Jasmani. Lama pendidikan adalah dua tahun dan lulusannya disamakan dengan Sekolah Kelas Dua atau *Standaard School* (Nasution 2001:64). *Schakelschool* sering disebut pula sebagai sekolah peralihan dari *volksschool* berbahasa pengantar bahasa daerah menjadi berbahasa pengantar Belanda. Lama belajarnya ialah lima tahun (Makmur et al. 1993:79). Harapan berdirinya *schakelschool* Islam di Pontianak sudah ditunggu sejak lama karena hingga 1930 tinggal kelompok pendidikan Islam yang belum memiliki sekolah setara dengan HIS. Kalangan misi Katolik bahkan sudah mendirikan dua *Hollandsch Chinese School* (HCS) pada 1924 dan 1930 (Ahok et al. 1980:48).

Lulusan *schakelschool* disamakan dengan lulusan HIS dan mata pelajaran yang diberikan juga serupa. Lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang MULO (Mandey 1930b:2). Dengan begitu, melalui *schakelschool* inilah anak-anak desa yang mengenyam pendidikan di *volksschool* dapat mencapai tingkat perguruan tinggi (Nasution 2001:121).

Sementara itu, sekolah Islam yang dikelola oleh Muhammadiyah di Pontianak ialah berjenis *volksschool* yang berada di Gang Mariana. Sekolah yang juga sering disebut sekolah rakyat ini lama pendidikannya hanya tiga tahun dengan kurikulum yang difokuskan pada penguasaan kemampuan membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta tentunya agama Islam. Bahasa yang digunakan sebagai pengantar ialah bahasa lokal (Agung dan Suparman 2012:24). Sayap organisasi wanita Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, juga mengelola taman

kanak-kanak atau *frobelschool*, namun istilah resmi yang digunakan oleh organisasi adalah *bustanul athfal* (BA). Tujuan pendirian BA ialah ingin menyemaikan ajaran tauhid yang benar kepada anak-anak. Pelajaran yang diberikan antara lain permainan tradisional, nyanyian, cerita, dan tentunya agama Islam, serta belajar membaca Al-Qur'an yang dimulai dengan pengenalan huruf-huruf Arab (Saerozi 2009:229).

Lulusan sekolah ini, apabila dirasa perlu, dapat melanjutkan ke *vervolg-school* ataupun *schakelschool* yang ada di sekitar Pontianak. Kemungkinan besar para murid melanjutkan pendidikannya di Perguruan Al-Islamiyah karena sama-sama sekolah Islam. *Volksschool* Muhammadiyah memiliki guru perempuan untuk memberikan pengajaran pada murid perempuan (Rozet 1927:2). Hal ini membuktikan bahwa sekolah telah membuka seluas-luasnya kesempatan kepada perempuan untuk mengakses pendidikan. Penulis melihat peran Aisyiyah sangat penting di sini. Sekolah Muhammadiyah ini juga cukup digemari dan mampu bertahan karena memiliki program kependuan yang bernama *Hizbul Wathan* (Ajisman 2016:346).

Perguruan Raudhatul Islamiyah yang baru berdiri pada 1936 di Kampung Mariana, juga mengalami perkembangan yang cukup baik dengan membuka *schakelschool*. Dalam iklannya di majalah *Kesadaran* pada 1940, sekolah ini menggunakan kurikulum *Leerplan* yang sama seperti *schakelschool* milik pemerintah. Di sekolah ini diajarkan pula bahasa Belanda dan bahasa Arab. Menariknya, biaya

pendidikan di sekolah ini disesuaikan dengan pendapatan orang tua dengan minimal tarif sebesar *f*2 per bulan, sedangkan biaya masuknya hanya *f*1.50 (Listiana 2019:100). Biaya pendidikan itu akan mendapatkan potongan apabila orang tua murid memiliki anak lain yang juga disekolahkan di perguruan ini. Dengan demikian, biaya pendidikan pada sekolah ini dirasa cukup ringan oleh masyarakat kelas bawah. Sementara itu, pengajaran agama Islam di Raudhatul Islamiyah banyak menggunakan kitab-kitab yang secara kategoris termasuk ke dalam ilmu hadits, tafsir dan ulumul Qur'an, *Nahwu-Sharaf-Balaghah*, *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, serta Ilmu *Faraidh* (Rahmatullah 2014:8-9).

Perkembangan yang fluktuatif dari sekolah Islam pada masa ini tidak hanya dirasakan oleh Perguruan Alqadriah. Perguruan Saigoniah, meskipun tidak sampai menghentikan operasionalnya, juga dianggap kurang berkembang karena posisinya yang berada di seberang Sungai Kapuas. Harus diakui bahwa perkembangan Pontianak ketika itu lebih pesat terjadi di seberang selatan Sungai Kapuas karena menjadi pusat kekuasaan pemerintah kolonial (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:44-45). Perguruan ini baru benar-benar ditutup ketika Jepang masuk ke Pontianak pada Februari 1942. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan penutupan seluruh sekolah yang ada. Pasca-kekalahannya Jepang, sekolah ini tidak dibuka lagi (Zurrendra 2019).

Nasib yang menimpa Perguruan Saigoniah juga dirasakan Madrasah Abdurrahmaniah. Sumber-sumber

tentang sekolah ini sayangnya sangat minim. Sekolah ini diketahui ikut ditutup pada masa pendudukan Jepang (Alqadrie dan Sastrowardoyo 1984:45). Keinginan para saudagar muslim untuk mendirikan sekolah Islam adakalanya gagal terwujud karena perselisihan internal dan menjadi ajang kepentingan pribadi. Sebagaimana yang diwartakan surat kabar *Berani* edisi 18 Juli 1925, pernah ada seorang saudagar berinisial SH yang ingin mendirikan sekolah Islam bersama rekan-rekannya. Padahal, sosok SH menurut pemberitaan surat kabar itu dikenal sebagai rentenir dan hanya ingin mencari muka (Boullie 1925a:3).

Maraknya pertumbuhan sekolah Islam di Pontianak pada periode ini menginspirasi para tokoh agama dan saudagar muslim di beberapa kota lain untuk mendirikan sekolah atau madrasah. Di Sungai Bakau Besar, berdiri Madrasah Najah Wal Falah di tahun 1918 (Irmayanti 2021:103). Masih di wilayah Mempawah, cabang Muhammadiyah Sungai Kunyit berhasil mendirikan Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah (1936) pimpinan Abdul Samad (Gaffar 1996:8-9). Di Singkawang per tahun 1938 telah berdiri beberapa madrasah, antara lain Islamiyah School, Madrasah Islam Semelagi Besar (dengan cabang di Semelagi Kecil dan Sungai Daun), Ahhadiyah School Sedau, dan Madrasah Setapak Besar (Ahmad 1938:2). Sementara itu, di Sambas, Madrasah Al-Sulthaniyah yang dikelola Maharaja Imam H.M Basiuni Imran, pada 1936 ditingkatkan statusnya dan berganti nama menjadi Schakelschool

Tarbiyatul Islam (Sunandar, Ibrahim, dan Huda 2019:82).

#### **D. SIMPULAN**

Kondisi pendidikan di Pontianak pada awal abad ke-20 diwarnai dengan beberapa persoalan. Salah satunya adalah sekolah-sekolah (pemerintah) yang berorientasi Barat. Sekolah ini dianggap semakin menjauhkan siswa dari budaya lokal dan tidak mendapatkan pendidikan agama. Hal itu mendorong sejumlah pihak mendirikan sekolah Islam, seperti Sekolah Muhammadiyah.

Berdirinya sekolah-sekolah Islam merupakan transformasi dari model pendidikan nonformal yang telah berlangsung ratusan tahun melalui keberadaan surau-surau atau langgar yang dipimpin seorang ulama. Pendidikan surau itu akhirnya dikembangkan menjadi sekolah atau madrasah untuk mengimbangi sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda. Pengelolaan pendidikan Islam juga dirasa tidak dapat lagi dipertahankan dengan corak tradisional.

Adanya aturan Priesterraden dan Ordonansi Sekolah Liar juga mendorong perubahan. Ulama atau kiai tidak lagi dapat secara bebas menyampaikan pengajarannya kecuali mendapatkan izin dan rekomendasi pemerintah kolonial. Sekolah Islam yang berdiri di Pontianak pada masa ini antara lain Perguruan Alqadriah (1914), Perguruan Saigoniah (1925), Perguruan Al-Islamiyah (1926), Sekolah Muhammadiyah (1927), dan Perguruan Raudhatul Islamiyah (1936).

Perubahan bentuk itu juga menandakan perubahan kurikulum, dengan berbentuk sekolah Islam (madrasah). Mata pelajaran ala Barat mulai diadopsi. Siswa mendapatkan bekal keagamaan dan memperoleh pengetahuan Barat dan bahkan mempelajari bahasa Belanda. Hal ini karena penguasaan pengetahuan Barat dan bahasa Belanda menjadi simbol kemajuan dan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan dan status sosial yang lebih baik. Secara umum, sekolah-sekolah Islam yang didirikan ini membuat kurikulumnya setara dengan tingkatan dan jenis sekolah milik pemerintah kolonial. Misalnya, Sekolah Muhammadiyah berjenis *volkschool* dengan mendapatkan program kepanduan (*Hizbul Wathan*). Perguruan Al-Islamiyah dan Perguruan Raudhatul Islamiyah membuka *schakelschool* sehingga kurikulum dan lulusannya setara dengan sekolah HIS. Sekolah-sekolah tersebut juga menerima siswa perempuan yang menandakan telah munculnya konsep kesetaraan dan pentingnya pendidikan untuk semua orang.

#### DAFTAR SUMBER

- Agung, Leo, dan T. Suparman. 2012. *Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ahmad, Abdul Rahim. 1938. "Perayaan Hari Maulid Nabi di Singkawang." *Borneo Barat Nieuws En Advertantieblad*, Juni, 6.
- Ahok, Pasifikus, Slamet Ismail, Wijoso Tjitrodarjono, Soedarto, dan Uray Syamsuri. 1980. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat*. Pontianak: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ajisman. 2016. "Perkembangan Lembaga Agama Islam di Kotamadya Pontianak pada Akhir Abad Ke-20." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 2(1):324-51.
- Akbar, Allan. 2013. "Ki Hajar dan Sekolah Liar." *Historia*. Diunduh 14 Juni, 2021 (<https://historia.id/politik/articles/ki-hajar-dan-sekolah-liar-v5zoP/page/1>).
- Alqadrie, Syarif Ibrahim, dan Pandil Sastrowardoyo. 1984. *Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Boullie. 1925a. "Apa Membuat 'Amalan', Apa Hendak Mencari Nama?" *Berani*, Juli, 18.
- \_\_\_\_\_. 1925b. "Nasehat Seorang Bapa Kepada Anaknja." *Berani*, Juli, 18.
- Gaffar, H. Hasan. 1996. *Informasi Singkat Muhammadiyah Kalimantan Barat*. Pontianak: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat.
- GBT. 1929. *Gids Voor Het Telefoon-complex Pontianak (West-Borneo)*. Pontianak: Gouvernements Bedrijf der Telefonie, (31):32.
- Irmayanti. 2021. "Sejarah Pendidikan Islam di Kalimantan Barat." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 3(2):95-113.



- Kanumuyoso, Bondan. 2020. *Metode Sejarah*. Jakarta: Direktorat PTLK, Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kumalasari, Dyah. 2013. *Diktat Sejarah Pendidikan II*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Listiana, Dana. 2017. "Rubrik 'Sinar Iboe' di Majalah Tjaja Timoer: Gagasan Penguatan Perempuan dalam Pers Lokal di Kalimantan Barat Tahun 1928." *Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya* 12(1):79-88.
- Listiana, Dana. 2019. "Indonesia dalam Penciptaan Nasionalisme Borneo: Rasa Kebangsaan Persatoean Anak Borneo" dalam Majalah *Kesadaran dan Doenia Pemoeda* di Kalimantan Barat Tahun 1940." Hlm. 83-119. dalam *Wacana Nasionalisme dalam Pers Kalimantan Barat pada Masa Pergerakan Kebangsaan*. Bandung: CV. Media Jaya Abadi.
- Makmur, Djohan, Pius Suryo Haryono, Sukri Musa, dan Hadi S. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mandey, L. 1929a. "Djangan diberi Harapan, Tetapi Minta Diboektikan." *Matahari Borneo*, Mei, 18.
- \_\_\_\_\_. 1929b. "Perserikatan Goeroe." *Matahari Borneo*, Februari, 28.
- \_\_\_\_\_. 1930a. "Dapatkah Kiranya Didirikan Ambachtschool dan Schakelschool di Salah Satu Tempat di Borneo Barat Ini?" *Matahari Borneo*, Januari, 23.
- \_\_\_\_\_. 1930b. "Tjontoh yang Baik." *Matahari Borneo*, Januari, 18.
- Miftahuddin. 2020. *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: UNY Press.
- Nasrullah, Ahmad M. Sewang, Syamsudduha, dan Said Nurman. 2018. "Pembaruan Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Basiuni Imran (1906-1976 M)." *Diskursus Islam* 06(01):135-55.
- Nasution, S. 2001. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurchayani, Lisyawati, Pembayun Sulistyorini, dan Hasanudin. 1999. *Kota Pontianak sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra*. Jakarta: CV. Ilham Bangun Karya.
- Rahmatullah, Muhammad. 2014. "Surau sebagai Pusat Pendidikan Islam pada Masa Kesultanan Pontianak." *At-Turats* 8(2).
- Ramadhan, Dendy, Hariansyah, dan Wahab. 2019. "Perguruan Islamiyah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tertua di Pontianak." *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 2(2):81-89.

- Rasjid, R. H. 1926a. "Keraimajan Madrasah Arab (Arabie School di Pontianak)." *Sinar Borneo*, Mei, 10.
- \_\_\_\_\_. 1926b. "Patut di Kenang." *Sinar Borneo*, 1-4.
- Rozet, U. 1927. "Cursus Mohamadiah." *Kapuas Bode*, September, 24.
- Saerozi, Muh. 2009. "Politik Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia Telaah Historis Raudhatul Athfal (RA) dan Taman Kanak-Kanak (TK)." *Miqot* XXXIII(2):226-44.
- Safitri, Yesi, Mujahidin, dan Henny Yusnita. 2020. "Pendidikan Islam di Kesultanan Sambas Awal Abad XX (Kajian Perkembangan Madrasah Al-Sulthaniyah Tahun 1916-1936 M)." *Jurnal Sambas (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)* 3(1):73-94.
- Soedarto, Widodo Adhisidharto, dan Sugeng. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Pontianak: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiono, Aman, Dyah Kumalasari, Sutopo, dan Apri Nuryanto. 2020. *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sunandar, Duski Ibrahim, dan Nor Huda. 2019. "Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) di Sambas." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15(1):75-91.
- Sutjiatiningsih. 1983. *Ny. Djohar Insiyah Suharso, Hasil Karya, dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wahidin. 2016. "Bawari Pontianak Peringat Milad Ke-80." *Tribun Pontianak* 2. Diunduh 17 Juni, 2021 (<https://pontianak.tribunnews.com/2016/10/22/bawari-pontianak-peringat-milad-ke-80>).
- Zahro, Hanifatuz, Agus Sastrawan Noor, dan Andang Firmansyah. 2019. "Sejarah Perkembangan Muhammadiyah di Kota Pontianak dari Tahun 1990-2000." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 8(7):1-10.
- Zurrendra. 2019. "Saigoniah Pondok Pesantren Pertama di Kalbar." *Pontianak Post Online*. Diunduh 15 Juni, 2021 (<https://pontianakpost.co.id/saigoniah-pondok-pesantren-pertama-di-kalb>).